BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Perusahaan

Berdasarkan Perda No.6 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, Inspektorat wilayah Kota Bandung berubah nomenklaturnya menjadi Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung. Berdasarkan kedudukannya Bawasda Kota Bandung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota, sedangkan bearkan tugas pokok nya adalah melaksanakan Pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Kekayaan Daerah, Selain itu Bawasda Kota Bandung mempunyai Visi dan Misi yaitu :

Inspektorat merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan di daerah, untuk melaksanakan tugas pokok Inspektorat mempunyai fungsi :

a. Perencanaan Program Pengawasan
b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan
c. Pemeriksaan, Pengutusan, Pengujuan, dan Penilaian tugas Pengawasan

d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat

Visi dan Misi Perusahaan

Visi

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Bermartabat melalui Pengawasan yang Profesional dan bertanggungjawab. Visi Inspektorat Kota Bandung yang tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat. Untuk merealisasikan keinginan, harapan serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut, yaitu :

Pertama, Inspektorat Kota Bandung sebagai lembaga teknis daerah harus dapat membantu Walikota dalam meningkatkan penegakan aturan, meminimalisir praktek KKN, penyalahgunaan wewenang, kebocoran , pemborosan kekayaan dan penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintahan melalui pengawasan secara profesional.

Kedua, Inspektorat Kota Bandung sebagai lembaga teknis daerah dalam membantu Walikota harus dapat mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya baik kepada Tuhan Yang Maha Esa mapun kepada negara / masyarakat.

Untuk merealisasikan visi tersebut, maka Inspektorat Kota Bandung mempunyai misi sebagai berikut :

Misi

1. Melakukan Pengawasan terhadap sistem, Mekanisme, Peraturan yang telah ditetapkan
2. Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranyaa Pemerintahan yang baik melalui Pengawasan Internal / Fungsional
3. Mendorong terwujudnya Aparat Pemerintah yang Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Responsif
4. Meningkatkan kualitas hasil Pengawasan dalam pengambilan keputusan pimpinan untuk peningkatan kinerja Aparat Pemerintah
5. Menumbuhkan sinergi antar Aparat Pengawas

Adapun Undang-Undang yang menjadi landasan Bawasda khususnya dalam melaksanakan tugasnya yaitu :

1. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Keputusan Presiden No.74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
5. Keputusan Walikota No.989 Tahun 2002 Tentang Pedoman Operasional

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung :

a. Inspektur
b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan
    2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
    3. Sub Bagian Administrasi dan Umum
c. Inspektur Pembantu Wilayah I :
    1. Seksi Pengawasan Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah I
    2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintah Wilayah I
    3. Seksi Pengawasan Kemasyarakatan Bidang Kemasyarakatan Wilayah I
d. Inspektur Pembantu Wilayah II :
    1. Seksi Pengawasan Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah II
    2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintah Wilayah II
    3. Seksi Pengawasan Kemasyarakatan Wilayah II
e. Inspektur Pembantu Wilayah III :
    1. Seksi Pengawasan Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah III
    2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintah Wilayah III
    3. Seksi Pengawasan Kemasyarakatan Bidang Kemasyarakatan Wilayah III
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV :

1. Seksi Pengawasan Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah IV
2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintah Wilayah IV
3. Seksi Pengawasan Kemasyarakatan Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV

g. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.3 Deskripsi tugas (Job Deskription)

Berikut Tugas – tugas pokok masing - masing Jabatan berdasarkan Struktur Organisasi pada Inspektorat Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengawsan dan pembinaan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyediakan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
   a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan
   b. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan
   c. Pelaksanaa penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah

d. Pelaksanaan penyusunan bahan / data pembinaan teknis fungsional
e. Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan
f. Pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan
g. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat, dan
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan

3. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam bidang perencanaan. Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana / program kerja pengawasan
   b. Penyiapan rancangan peraturan perundang – undangan
   c. Penyiapan rancangan peraturan perundang – undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan
   d. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan
   e. Penyusunan anggaran Inspektorat, dan
   f. Pelaporan kegiatan perencanaan

4. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam bidang evaluasi dan pelaporan. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
    a. Pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
    b. Pelaksanaan pengadministrasian laporan hasil pengawasan
    c. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan
    d. Peaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan
    e. Penyusunan statistik hasil pengawasan
    f. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan, dan
    g. Pelaporan kegiatan evaluasi dan pelaporan
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang administrasi dan umum. Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :
        a. Pelaksanaan pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumah tanggaan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas
        b. Pengelolaan urusan kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan dan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai
        c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, dan
        d. Pelaporan kegiatan di bidang administrasi dan umum

6. Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di instansi / satuan kerja perangkat daerah sesuai wilayah kerja nya. Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :
    a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya
    b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawaasan di wilayah kerjanya
    c. Pelaksanaan tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
    d. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan, dan
    e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan
7. Seksi Pengawasan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Pembangunan sesuai wilayah kerja nya. Seksi Pengawasan Pembangunan mempunyai fungsi :
    a. Pengusulan program Pengawasan bidang Pembangunan
    b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan
    c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan
    d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan, dan
    e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan bidang pembangunan

8. Seksi Pengawasan Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai wilayah kerja nya. Seksi Pengawasan Pemerintahan mempunyai fungsi :
    a. Pengusulan program pengawasan bidang pemerintahan
    b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan
    c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan
    d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang Pemerintahan
9. Seksi Pengawasan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kemasyarakatan sesuai wilayah kerja nya. Seksi Pengawasan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
    a. Pengusulan program pengawasan bidang kemasyarakatan
    b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan
    c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan
    d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan, dan
    e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan bidang kemasyarakatan

10 . Kelompok Jabatan Fungsional pengaturan Tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat akan diatur setelah dibentuk, ditetapakan jenis dan jenjanganya oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4.1.4 Aktivitas Perusahaan

Setiap Inspektur Pembantu yang dibantu oleh masing-masing Seksi Pengawasan sesuai bidang tugasnya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap instansi / satuan kerja perangkat daerah berdasarkan wilayah kerja. Wilayah sebagaimana dimaksud terdiri dari instansi / satuan kerja perangkat daerah yaitu :

a. Wilayah I, meliputi :

1 . Dinas Bina Marga dan Pengairan

2 . Dinas Perhubungan

3 . Dinas Kebakaran

4 . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5 . Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

6 . Badan Kepegawaian Daerah

7 . Satuan Polisi Pamong Praja

8 . Rumah Sakit Umum Daerah

9 . Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat

10 . Bagian Pemerintahan Umum

11 . Bagian Keuangan

12 . Kecamatan Sukasari

13 . Kecamatan Sukajadi

14 . Kecamatan Cicendo

15 . Kecamatan Andir

16 . Kecamatan Cidadap

17 . Kecamatan Coblong

18 . Kecamatan Bandung Wetan

19 . Kecamatan Cibeunying Kaler

b. Wilayah II, meliputi :

1 . Asisten Pemerintahan

2 . Dinas Pendapatan

3 . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4 . Dinas Pendidikan

5 . Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

6 . Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

7 . Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

8 . Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

9 . Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak

10 . Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah

11 . Bagian Pengelolaan Aset

12 . Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

13 . Kecamatan Cibeunying Kidul

14 . Kecamatan Sumur Bandung

15 . Kecamatan Batununggal

16 . Kecamatan Regol

17 . Kecamatan Lengkong

18 . Kecamatan Kiaracondong

19 . Kecamatan Antapani

c. Wilayah III, meliputi :

1 . Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

2 . Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung

3 . Dinas Sosial

4 . Dinas Kesehatan

5 . Dinas Pertanian

6 . Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

7 . Badan Kesbang Linmas dan Pemberdayaan Masyarakat

8 . Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut

9 . Perusahaan Daerah Kebersihan

10 . Bagian Hukum dan HAM

11 . Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

12 . Bagian Umum dan Perlengkapan

13 . Kecamatan Bandung Kulon

14 . Kecamatan Bojongloa Kaler

15 . Kecamatan Babakan Ciparay

16 . Kecamatan Bojongloa Kidul

17 . Kecamatan Astanaanyar

18 . Kecamatan Bandung Kidul

19 . Kecamatan Buah batu

d. Wilayah IV, meliputi :

1 . Asisten Administrasi Umum

2 . Dinas Tenaga Kerja

3 . Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Perdagangan

4 . Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

5 . Dinas Pertamanan

6 . Badan Komunikasi dan Informatika

7 . Kantor Pengelolaan Pemakaman

8 . Perusahaan Daerah Air Minum

9 . Bagian Perekonomian

10 . Bagian Ketahanan Pangan

11 . Bagian Tata Usaha Pimpinan

12 . Kecamatan Rancasari

13 . Kecamatan Panyileukan

14 . Kecamatan Gede Bage

15 . Kecamatan Cibiru

16 . Kecamatan UjungBerung

17 . Kecamatan Mandalajati

18 . Kecamatan Cinambo

19 . Kecamatan Arcamanik

4.2 Karakteristik Responden

Data responden dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 51 responden. Untuk variabel X_1, X_2, dan Y kuesioner diberikan kepada objek yaitu Aparat Pengawas yang masuk ke wilayah IRBAN. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut :

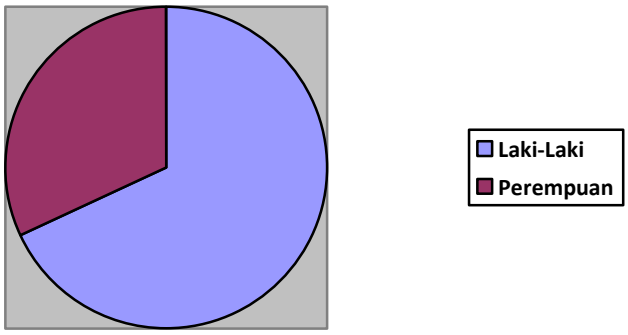
1) Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Laki-laki	35 orang	68%
Perempuan	16 orang	32%
Jumlah	51 orang	100%

Sumber : **Data primer yang telah diolah**



Gambar 4.1
Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki berjumlah 35 orang atau sebesar 68% dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 16 orang atau sebesar 32%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada Aparat Pengawas lebih banyak responden laki-laki, dan pada kenyataanya Aparat Pengawas laki-laki lebih banyak daripada perempuan pada Inspektorat Kota Bandung. Hal ini dikarenakan laki – laki lebih dianggap lebih mampu menjalankan tugas sebagai aparat pemeriksa

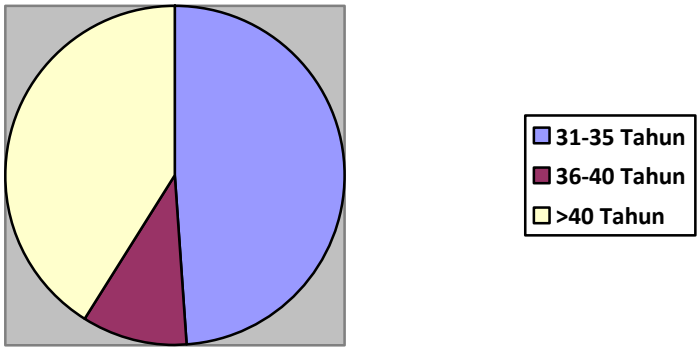
2) Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase %
31-35 Tahun	25 orang	49%
36-40 Tahun	10 orang	10%
>40 Tahun	26 orang	41%
Jumlah	51 orang	100%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011



Gambar 4.2
Diagram Responden Berdasarkan Umur Responden

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia dibawah 31 - 35 tahun berjumlah 25 orang, dan yang berusia 36 – 40 tahuun sebanyak 10 orang sebesar dan >40 tahun berjumlah 26 orang atau sebesar jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia >40 tahun. Hal ini disebabkan kuesioner yang dibagikan kepada Aparat Pengawas lebih banyak berumur >40 tahun. Selain itu rata-rata usia pada Aparat Pengawas berusia 36 - 40 tahun. Hal ini dikarenakan umur masih dianggap sebagai tolak ukur dalam menentukan seorang aparat pengawas memiliki pengalaman atau tidak.

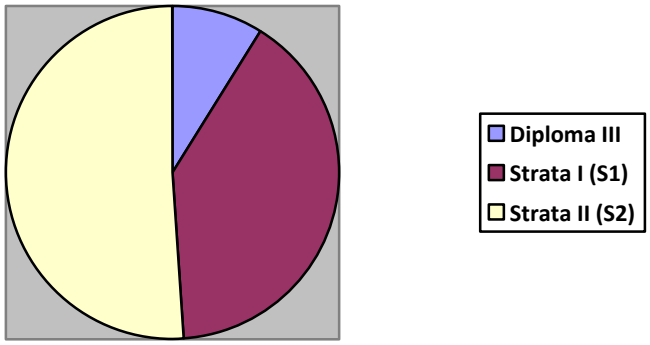
3) Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
Diploma III	5 orang	9%
Strata I (S1)	20 orang	40%
Strata II (S2)	26 orang	51 %
Jumlah	51 orang	100%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011



Gambar 4.3
Diagram Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan diploma 3 sebanyak 5 orang atau sebesar 9% pendidikan terakhir Strata I (S1) sebanyak 20 orang atau sebesar 40% dan pendidikan terakhir Strata II (S2) sebanyak 26 orang atau sebesar 51%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata II (S2). Hal ini dikarenakan semakin tinggi pendidikan seorang aparat pengawas maka ia akan semakin berkompeten

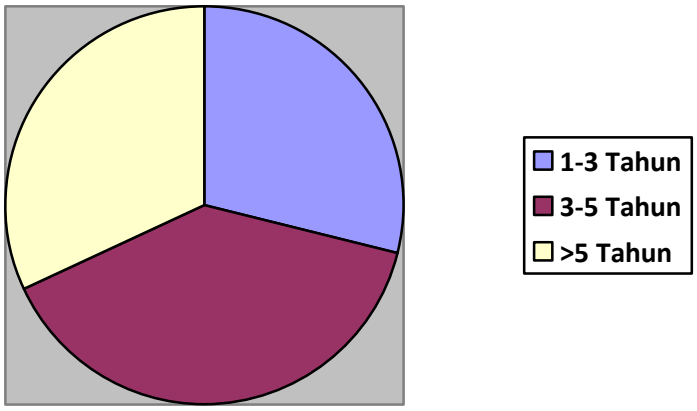
4) Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
1– 3 Tahun	15orang	29%
3 – 5 Tahun	20 orang	39%
>5 Tahun	16 orang	32%
Jumlah	51 orang	100%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011



Gambar 4.4
Diagram Responden Berdasarkan Lama Kerja

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang bekerja dengan lama 1 - 3 tahun sebanyak 15 orang atau sekitar 29 %, dan yang bekerja 3 – 5 tahun sebanyak 20 orang atau 39% dan yang bekerja >5 tahun sebanyak 16 orang atau 32%, dapat disimpulkan bahwa aparat pengawas yang dijadikan responden terbanyak memiliki masa kerja selama 3 – 5 tahun.

4.3 Analisis Deskriptif

4.3.1 Analisis Kinerja Pegawai Pada Inspektorat Kota Bandung

Dalam penelitian ini digunakan perbandingan antara skor aktual yang diperoleh dari data penelitian sebagai indikator Kinerja Pegawai dan Kinerja Pegawai yang dapat dilihat dari dengan skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

Keterangan :

1. Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan.
2. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.

Prinsip pengklasifikasian persentase skor jawaban responden diadopsi dari buku Metode Penelitian Bisnis karangan Sugiyono dengan kriteria pengklasifikasian sebagai berikut:

Tabel 4.5
Kriteria Skor Jawaban Responden Berdasarkan Persentase Skor Aktual

No	Persentase Skor	Kategori Skor
1	20,00 – 36,00	Sangat Rendah/ Tidak Baik
2	36,01 – 52,00	Rendah/ Kurang Baik
3	52,01 – 68,00	Cukup Tinggi/ Cukup Baik
4	68,01 – 84,00	Tinggi/ Baik
5	84,01 – 100	Sangat Tinggi/ Sangat Baik

Kinerja adalah unjuk kerja yang merupakan hasil kerja dihasilkan oleh pegawai atau prilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam

organisasi Dalam penelitian ini Kinerja Pegawai diukur dengan 5 indikator yaitu Prestasi Kerja, Kejujuran, Kedisiplinan, Kreativitas dan Kepemimpinan.

Tabel 4.6

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Kinerja Pegawai

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Prestasi Kerja	I76	255	69,0%	Baik
2	Kejujuran	64	255	64,3%	cukup baik
3	Kedisiplinan	184	255	72,2%	Baik
4	Kreativitas	134	255	52,5%	Cukup baik
5	Kepemimpinan	185	255	72,5%	Baik
Total		743	1275	66,1%	Baik

1. **Prestasi Kerja**

Tabel 4.7
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Prestasi Kerja

Tanggapan	Bobot	F	Skor	%
Mempelajari aturan baru	5	13	65	25.49
Mengikuti seminar /pelatihan	4	9	36	17.65
Berdiskusi	3	19	57	37.25
Bermain game	2	8	16	15.69
Keluar kantor	1	2	2	3.92
Jumlah		51	176	100.00

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan mempelajari aturan baru jika tidak ada penugasan dalam hal pemeriksaan menyatakan Mempelajari aturan baru sebesar 25.49% dan yang menyatakan Berdiskusi sebesar 17.65%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden berusaha untuk memanfaatkan waktu dengan hal bermanfaat untuk memperoleh Prestasi Kerja yang baik.

Untuk menilai tanggapan terhadap Indikator Prestasi Kerja berdasarkan tabel diatas, maka digunakan rumus perbandingan skor aktual dan skor ideal sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{176}{51 \times 5} \times 100\%$$

% skor aktual = 69,0%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Prestasi Kerja berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui sebesar 83,5%. Nilai yang mengandung pengertian bahwa Indikator Prestasi Kerja telah masuk dalam penilaian dengan kategori baik.

2. **Kejujuran**

Tabel 4.8
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kejujuran

Tanggapan	Bobot	F	Skor	%
Mengerjakan tugas yang diberikan	5	14	70	27.45
Mengikuti aturan atasan	4	5	20	9.80
Berdiskusi	3	10	30	19.61
Bercanda dengan teman	2	22	44	43.14
Bolos bekerja	1	0	0	0.00
Jumlah		51	164	100.00

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa sebagian responden sebesar 27.45% menyatakan mengerjakan tugas yang diberikan jika atasan memberikan kepercayaan kepada pegawai untuk melaksanakan tugas penting dan yang menyatakan mengikuti aturan atasan sebesar 9.80%. Jadi dapat disimpulkan

bahwa mayoritas dari responden berusaha untuk berlaku jujur dalam memperoleh prestasi kerja yang baik.

Untuk menilai tanggapan terhadap Indikator Kejujuran berdasarkan tabel diatas, maka digunakan rumus perbandingan skor aktual dan skor ideal sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{64}{51 \times 5} \times 100\%$$

% skor aktual = 64,3%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Kejujuran berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui sebesar 64,3%. Nilai yang mengandung pengertian bahwa Indikator Kejujuran telah masuk dalam penilaian dengan kategori cukup baik.

3. **Kedisiplinan**

Tabel 4.9
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kedisiplinan

Tanggapan	Bobot	F	Skor	%
Selalu mengerjakan tugas yang diberikan	5	10	50	19.61
Datang ke kantor tepat wakt	4	20	80	39.22
Mengikuti kegiatan kantor	3	12	36	23.53
Berdiskusi	2	9	18	17.65
Selalu telat datang ke kantor	1	0	0	0.00
Jumlah		51	184	100.00

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan selalu mengerjakan tugas yang diberikan sebagai bentuk kedisiplinan

para pegawai dalam bekerja sebesar 19.61% dan yang menyatakan datang ke kantor tepat waktu sebesar 39.22%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden berusaha disiplin untuk memperoleh Prestasi Kerja yang baik.

Untuk menilai tanggapan terhadap Indikator Kedisiplinan berdasarkan tabel diatas, maka digunakan rumus perbandingan skor aktual dan skor ideal sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{184}{51 \times 5} \times 100\%$$

% skor aktual = 72,2%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Kedisiplinan berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui sebesar 72,2%. Nilai yang mengandung pengertian bahwa Indikator Kedisiplinan telah masuk dalam penilaian dengan kategori baik.

4. **Kreativitas**

Tabel 4.10
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kreativitas

Tanggapan	Bobot	F	Skor	%
Mengikuti seminar/pelatihan	5	0	0	0.00
Mengerjakan tugas yang diberikan	4	9	36	17.65
Berdiskusi tentang pekerjaan	3	15	45	29.41
Bermain game	2	26	52	50.98
Mangkir dari pekerjaan	1	1	1	1.96
Jumlah		51	134	100.00

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui sebesar 17.65% menyatakan Mengerjakan tugas yang diberikan.

Untuk menilai tanggapan terhadap Indikator Kreativitas berdasarkan tabel diatas, maka digunakan rumus perbandingan skor aktual dan skor ideal sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{134}{51 \times 5} \times 100\%$$

% skor aktual = 52,5%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Kreativitas berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui sebesar 52,5%. Nilai yang mengandung pengertian bahwa Indikator Kreativitas telah masuk dalam penilaian dengan kategori cukup baik.

5. **Kepemimpinan**

Tabel 4.11
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kepemimpinan

Tanggapan	Bobot	F	Skor	%
Gaya kepemimpinan	5	17	85	33.33
interaksi dengan pegawai	4	12	48	23.53
Acuh tak acuh	3	8	24	15.69
Tidak peduli	2	14	28	27.45
Sangat tidak peduli	1	0	0	0.00
Jumlah		51	185	100.00

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sebesar 33.33% menyatakan Gaya kepemimpinan merupakan hal yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai dari kepemimpinan atasannya dan yang menyatakan interaksi dengan pegawai sebesar 23.53%. Jadi dapat disimpulkan

bahwa mayoritas dari responden menilai kepemimpinan penting untuk memperoleh Prestasi Kerja yang baik.

Untuk menilai tanggapan terhadap Indikator Kepemimpinan berdasarkan tabel diatas, maka digunakan rumus perbandingan skor aktual dan skor ideal sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{185}{51 \times 5} \times 100\%$$

% skor aktual = 72,5%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Kepemimpinan berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui sebesar 72,5%. Nilai yang mengandung pengertian bahwa Indikator Kepemimpinan telah masuk dalam penilaian dengan kategori baik.

Kesimpulan secara menyeluruh mengenai variabel Kinerja Pegawai adalah dengan menentukan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban maksimal dan jumlah skor jawaban minimal, kemudian menentukan range dengan cara jumlah skor maksimal dikurangi jumlah skor minimal. Tanggapan responden terhadap variabel Kinerja Pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12

Persentase skor aktual variabel Kinerja Pegawai

Kriteria Jawaban	No. Instrumen					Total
	1	2	3	4	5	
Sangat baik	65	70	50	0	85	270
Baik	36	20	80	36	48	220
Cukup baik	57	30	36	45	24	192
Tidak baik	16	44	18	52	28	158
Sangat Tidak baik	2	0	0	1	0	3
Jumlah Skor Aktual	176	164	184	134	185	843
Jumlah Skor Ideal	**255**	**255**	**255**	**255**	**255**	1275

Untuk menilai tanggapan terhadap variabel Kinerja Pegawai berdasarkan tabel diatas, maka digunakan rumus perbandingan skor aktual dan skor ideal sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{843}{1275} \times 100\%$$

% skor aktual = 66,1%

Hasil persentase skor aktual dari variabel Kinerja Pegawai berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui sebesar 66,1%. Nilai yang mengandung pengertian bahwa variabel Kinerja Pegawai masuk dalam penilaian dengan kategori cukup baik dari pegawai . Melihat dari kesimpulan tersebut diatas maka untuk penyempurnaan faktor-faktor kinerja pegawai yang menunjukkan kriteria cukup baik dalam hasil penelitian ini, namun perlu ada peningkatan yang harus diperhatikan terutama dalam hal peningkatan kemampuan dan keahlian dalam

menanggulangi masalah keuangan daerah yaitu melalui pengarahan pada setiap pegawai untuk pekerjaannya.

4.3.2 Analisis Pengawasan Fungsional Pada Inspektorat Kota Bandung

Pengawasan Fungsional adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dan aturan – aturan yang telah ditetapkan Dalam penelitian ini Pengawasan Fungsional diukur dengan 3 indikator yaitu Persiapan pemeriksaan, Pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan pemeriksaan.

Table 4.13

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Pengawasan Fungsional

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Persiapan Pemeriksaan	174	255	68,2%	Baik
2	Pelaksanaan Pemeriksaan	189	255	74,1%	Baik
3	Penyusunan Laporan Pemeriksaan	158	255	62,0%	cukup baik

1. Persiapan pemeriksaan

Tabel 4.14

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Persiapan pemeriksaan

Tanggapan	Bobot	F	Skor	%
1 kali	1	14	14	27.45
2 - 6 kali	2	6	12	11.76
7 – 9 kali	3	3	9	5.88
10 kali	4	1	4	1.96
Lebih dari 10 kali	5	27	135	52.94
Jumlah		51	174	100.00

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sebesar 52.94% menyatakan Lebih dari 10 kali aparat pengawas melakukan pengawasan dan yang menyatakan 1 kali sebesar 27.45%.

Untuk menilai tanggapan terhadap Indikator Persiapan pemeriksaan berdasarkan tabel diatas, maka digunakan rumus perbandingan skor aktual dan skor ideal sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{174}{51 \times 5} \times 100\%$$

% skor aktual = 68,2%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Persiapan pemeriksaan berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui sebesar 68,2%. Nilai yang mengandung pengertian bahwa Indikator Persiapan pemeriksaan telah masuk dalam penilaian dengan kategori baik.

2. Pelaksanaan pemeriksaan

Tabel 4.15
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan pemeriksaan

Tanggapan	Bobot	F	Skor	%
Tidak kompeten dan relevan	1	0	0	0.00
Kompeten tapi tidak relevan	2	16	32	31.37
Ragu-ragu / Tidak tau	3	5	15	9.80
Relevan tapi tidak kompeten	4	8	32	15.69
Sangat relevan dan kompeten	5	22	110	43.14
Jumlah		51	189	100.00

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bukti yang didapatkan sebagai dasar bagi temuan dan rekomendasi sangat relevan dan kompeten sebesar 43.14%.

Untuk menilai tanggapan terhadap Indikator Pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan tabel diatas, maka digunakan rumus perbandingan skor aktual dan skor ideal sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{189}{51 \times 5} \times 100\%$$

% skor aktual = 74,1%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui sebesar 74,1%. Nilai yang mengandung pengertian bahwa Indikator Pelaksanaan pemeriksaan telah masuk dalam penilaian dengan kategori baik.

3. Penyusunan laporan pemeriksaan

Tabel 4.16
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Penyusunan laporan pemeriksaan

Tanggapan	Bobot	F	Skor	%
Sangat terjaga	5	3	15	5.88
Terjaga	4	15	60	29.41
Cukup terjaga	3	17	51	33.33
Tidak terjaga	2	16	32	31.37
Sangat Tidak terjaga	1	0	0	0.00
Jumlah		51	158	100.00

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan temuan atas hasil laporan pemeriksaan kerahasiaannya cukup terjaga sebesar 33.33%, yang menyatakan terjaga sebesar 29.41%. dan yang menyatakan sangat terjaga sebesar 5.88%.

Untuk menilai tanggapan terhadap Indikator Penyusunan laporan pemeriksaan berdasarkan tabel diatas, maka digunakan rumus perbandingan skor aktual dan skor ideal sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{158}{51 \times 5} \times 100\%$$

% skor aktual = 62,0%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Penyusunan laporan pemeriksaan berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui sebesar 62,0%. Nilai yang mengandung pengertian bahwa Indikator Penyusunan laporan pemeriksaan telah masuk dalam penilaian dengan kategori cukup baik. . Melihat dari kesimpulan tersebut diatas maka untuk penyempurnaan faktor-faktor kinerja pegawai yang menunjukkan kriteria cukup baik dalam hasil penelitian ini, namun perlu ada peningkatan yang harus diperhatikan terutama dalam hal peningkatan kemampuan dan keahlian dalam menanggulangi masalah keuangan daerah yaitu melalui pengarahan pada setiap pegawai untuk pekerjaannya.

Kesimpulan secara menyeluruh mengenai variabel Pengawasan Fungsional adalah dengan menentukan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban maksimal dan

jumlah skor jawaban minimal, kemudian menentukan range dengan cara jumlah skor maksimal dikurangi jumlah skor minimal. Tanggapan responden terhadap variabel Pengawasan Fungsional adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17

Persentase skor aktual variabel Pengawasan Fungsional

Kriteria Jawaban	No. Instrumen			Total
	1	2	3	
Sangat baik	14	0	15	29
Baik	12	32	60	104
Cukup baik	9	15	51	75
Tidak baik	4	32	32	68
Sangat Tidak baik	135	110	0	245
Jumlah Skor Aktual	174	189	158	521
Jumlah Skor Ideal	255	255	255	765

Untuk menilai tanggapan terhadap variabel Pengawasan Fungsional berdasarkan tabel diatas, maka digunakan rumus perbandingan skor aktual dan skor ideal sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{521}{765} \times 100\%$$

% skor aktual = 68,1%

Hasil persentase skor aktual dari variabel Pengawasan Fungsional berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui sebesar 68,1%. Nilai yang mengandung pengertian bahwa variabel Pengawasan Fungsional. Melihat dari kesimpulan tersebut diatas maka untuk penyempurnaan faktor-faktor pelaksanaan pengawasan fungsional yang menunjukkan kriteria cukup baik dalam hasil

penelitian ini, namun perlu ada peningkatan yang harus diperhatikan terutama dalam hal peningkatan kemampuan dan keahlian dalam menanggulangi masalah pengawasan yaitu melakukan koordinasi di antara para Aparat Pengawas Fungsional dalam tata cara pengawasan.

4.3.3 Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Inspektorat Kota Bandung

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah merupakan Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam penelitian ini Efektivitas pengelolaan keuangan daerah diukur dengan 4 indikator yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian

Table 4.18
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Akuntabilitas	365	510	71,6%	Baik
2	Transparansi	194	255	76,1%	Baik
3	Pengendalian	191	255	74,9%	Baik

1. **Akuntabilitas**

Tabel 4.19
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Akuntabilitas hasil optimal

Tanggapan	Bobot	F	Skor	%
Sangat optimal	5	12	60	23.53
Optimal	4	26	104	50.98
Cukup optimal	3	4	12	7.84
Tidak optimal	2	9	18	17.65
Sangat tidak optimal	1	0	0	0.00
Jumlah		51	194	100.00

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan hasil pekerjaan lapangan yang dibuat memberikan hasil optimal sebesar 50.98% dan yang menyatakan sangat optimal sebesar 23.53%.

Tabel 4.20
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Akuntabilitas Pertanggungjawaban

Tanggapan	Bobot	F	Skor	%
Sangat baik	5	5	25	9.80
Baik	4	18	72	35.29
Cukup baik	3	18	54	35.29
Tidak baik	2	10	20	19.61
Sangat Tidak baik	1	0	0	0.00
Jumlah		51	171	100.00

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil baik sebesar 35.29% dan yang menyatakan cukup baik sebesar 35.29%.

Kesimpulan secara menyeluruh mengenai Indikator Akuntabilitas adalah dengan menentukan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban maksimal dan jumlah skor jawaban minimal, kemudian menentukan range dengan cara jumlah skor

maksimal dikurangi jumlah skor minimal. Tanggapan responden terhadap Indikator Akuntabilitas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21
Persentase skor aktual Indikator Akuntabilitas

Kriteria Jawaban	No. Instrumen		Total
	1	2	
Sangat baik	60	25	85
Baik	104	72	176
Cukup baik	12	54	66
Tidak baik	18	20	38
Sangat Tidak baik	0	0	0
Jumlah Skor Aktual	194	171	365
Jumlah Skor Ideal	255	255	510

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah, 2011

Untuk menilai tanggapan terhadap Indikator Akuntabilitas berdasarkan tabel diatas, maka digunakan rumus perbandingan skor aktual dan skor ideal sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{365}{510} \times 100\%$$

% skor aktual = 71,6%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Akuntabilitas berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui sebesar 71,6%. Nilai yang mengandung pengertian bahwa Indikator Akuntabilitas telah masuk dalam penilaian dengan kategori baik.

2. **Transparansi**

Tabel 4. 22
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Transparansi

Tanggapan	Bobot	F	Skor	%
Sangat objektif	5	13	65	25.49
Cukup objektif	4	22	88	43.14
Tidak relevan	3	9	27	17.65
Tidak objektif	2	7	14	13.73
Sangat tidak objektif	1	0	0	0.00
Jumlah		51	194	100.00

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan keterangan atau bukti yang dianggap mendukung penyelenggaraan pemerintah cukup objektif sebesar 43.14% dan yang menyatakan sangat objektif sebesar 25.49%.

Untuk menilai tanggapan terhadap Indikator Transparansi berdasarkan tabel diatas, maka digunakan rumus perbandingan skor aktual dan skor ideal sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{194}{51 \times 5} \times 100\%$$

% skor aktual = 76,1%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Transparansi berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui sebesar 76,1%. Nilai yang mengandung pengertian bahwa Indikator Transparansi telah masuk dalam penilaian dengan kategori baik.

3. **Pengendalian**

Tabel 4.23
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengendalian

Tanggapan	Bobot	F	Skor	%
Sangat sesuai	5	9	45	17.65
Sesuai	4	26	104	50.98
Cukup sesuai	3	10	30	19.61
Tidak sesuai	2	6	12	11.76
Sangat tidak sesuai	1	0	0	0.00
Jumlah		51	191	100.00

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan sesuai sebesar 50.98% dan yang menyatakan sangat sesuai sebesar 17.65%.

Untuk menilai tanggapan terhadap Indikator Pengendalian berdasarkan tabel diatas, maka digunakan rumus perbandingan skor aktual dan skor ideal sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{191}{51 \times 5} \times 100\%$$

% skor aktual = 74,9%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Pengendalian berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui sebesar 74,9%. Nilai yang mengandung pengertian bahwa Indikator Pengendalian telah masuk dalam penilaian dengan kategori baik.

Kesimpulan secara menyeluruh mengenai variabel Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan menentukan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban maksimal dan jumlah skor jawaban minimal, kemudian menentukan range dengan cara jumlah skor maksimal dikurangi jumlah skor minimal. Tanggapan responden terhadap variabel Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.24
Persentase skor aktual variabel Efektivitas pengelolaan keuangan daerah

Kriteria Jawaban	No. Instrumen				Total
	9	10	11	12	
Sangat Setuju (5)	60	25	65	45	195
Setuju (4)	104	72	88	104	368
Cukup Setuju (3)	12	54	27	30	123
Tidak Setuju (2)	18	20	14	12	64
Sangat Tidak Setuju (1)	0	0	0	0	0
Jumlah Skor Aktual	194	171	194	191	750
Jumlah Skor Ideal	255	255	255	255	1020

Untuk menilai tanggapan terhadap variabel Efektivitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan tabel diatas, maka digunakan rumus perbandingan skor aktual dan skor ideal sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{750}{1020} \times 100\%$$

% skor aktual = 73,5%

Hasil persentase skor aktual dari variabel Efektivitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui sebesar 73,5%.

Nilai yang mengandung pengertian bahwa variabel Efektivitas pengelolaan keuangan daerah telah masuk dalam penilaian dengan kategori baik dari pegawai. Melihat dari kesimpulan tersebut diatas maka untuk penyempurnaan faktor-faktor efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang menunjukkan kriteria baik dalam hasil penelitian ini, namun perlu ada peningkatan yang harus diperhatikan terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dalam menanggulangi masalah pengelolaan keuangan daerah yaitu melakukan tata kelola yang baik terhadap pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien.

4.4 Analisis Verifikatif

Dalam menguji pengaruh Kinerja pegawai dan Pengawasan fungsional terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini digunakan pendekatan analisis regresi linear berganda dan analisis korelasi *product moment.*

Untuk memenuhi syarat data yang digunakan sekurang-kurangnya mempunyai tingkat pengukuran interval, data yang dikumpulkan dari kuisioner yang mempunyai skala pengukuran ordinal, terlebih dahulu ditransformasikan menjadi skala interval menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI).

Hasil perhitungan skor data variabel X dan Y setelah ditransformasikan menjadi skala interval menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI) dapat dilihat pada lampiran.

Data yang digunakan sebagai variabel bebas (X) adalah Kinerja Pegawai dan Pengawasan fungsional dan sebagai variabel tak bebas (Y) adalah efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang telah ditransformasikan ke skala pengukuran

interval dengan MSI selanjutnya digunakan untuk perhitungan dan pengujian hipotesis.

4.4.1 Pengaruh Kinerja Pegawai dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah

Perhitungan persamaan regresi Kinerja Pegawai dan pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah menggunakan rumus regresi.

4.4.1.1 Hasil Analisis Regresi

Dalam penelitian ini akan dilihat pengaruh Kinerja Pegawai dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pada model regresi yang digunakan variabel Kinerja Pegawai dan Pengawasan Fungsional merupakan variabel bebas (X) dan variabel tidak bebas (Y) adalah Efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Untuk model matematis untuk hubungan antara dua variabel tersebut adalah persamaan regresi berganda, yaitu sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Y = a + b_1X_1 + b_2X_2}$$

Nilai a, b_1 dan b_2 dapat di cari dengan menyelesaikan persamaan dengan rumus berikut

$$\sum Y = \text{na} + \mathbf{b_1} \sum X_1 + \mathbf{b_2} \sum X_2$$

$$\sum X_1Y = \text{a} \sum X_1 + \mathbf{b_1} \sum X_1^2 + \mathbf{b_2} \sum X_1X_2$$

$$\sum X_2Y = \mathbf{a} \sum X_2 + \mathbf{b_1} \sum X_1X_2 + \mathbf{b_2} \sum X_2^2$$

Nilai nilai yang akan digunakan dalam menghitung koefisien regresi dan korelasi menggunakan rumus adalah sebagai berikut:

$\sum X_1 = 134{,}482$ $\sum X_2 = 110{,}078$ $\sum Y = 129{,}488$

$\sum X_1^2 = 380{,}335$ $\sum X_2^2 = 266{,}822$ $\sum Y^2 = 357{,}144$

$\sum X_1 Y = 539{,}479$ $\sum X_2 Y = 297{,}046$ $\sum X_1 X_2 = 301{,}912$

Menggunakan nilai tersebut di atas selanjutnya dapat dilakukan perhitungan korefisien regresi sebagai berikut :

Hasil perhitungan perhitungan koefisien regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 14 for windows berdasarkan data penelitian adalah berikut :

Tabel 4.25
Hasil Perhitungan Koefisien Regresi X terhadap Y

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.279	.282		.987	.328
	X1 (Kinerja Pegawai)	.542	.107	.516	5.059	.000
	X2 (Pengawasan Fungsional)	.385	.101	.390	3.825	.000

a. Dependent Variable: Y (Efektivitas pengelolaan keuangan daerah)

Sumber : Lampiran Output SPSS

Diperoleh persamaan regresi taksiran untuk melihat pengaruh Kinerja Pegawai dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

$\hat{Y} = 0{,}279 + 0{,}542\ X_1 + 0{,}390\ X_2$

Persamaan regresi yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Nilai konstanta pada persamaan sebesar 0,279 menjelaskan nilai rata-rata Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada saat Kinerja Pegawai dan

Pengawasan Fungsional konstan (tidak berubah) atau sama dengan nol adalah sebesar 0,279.

2. Koefisien regresi untuk Kinerja Pegawai (X_1) bertanda positif sebesar 0,542 menunjukkan perubahan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) jika Kinerja Pegawai meningkat sebesar satu satuan. Jadi jika skor Kinerja Pegawai meningkat sebesar 1 satuan maka akan terjadi peningkatan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,542. Jadi semakin tinggi kinerja pegawai maka Efektivitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik.
3. Koefisien regresi untuk Pengawasan Fungsional (X_2) bertanda positif sebesar 0,390 menunjukkan perubahan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) jika Pengawasan Fungsional meningkat sebesar satu satuan. Jadi jika skor Pengawasan Fungsional meningkat sebesar 1 satuan maka akan terjadi peningkatan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,390. Jadi semakin tinggi Pengawasan Fungsional maka Efektivitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik.

4.4.1.2 Pengujian Asumsi Regresi

Pengujian asumsi regresi dilakukan untuk melihat validitasi persamaan regresi karena model regresi diperoleh melalui penaksran menggunakan metode estimasi *Ordinary Least Square* (OLS). Asumsi yang diuji untuk model regresi ini adalah normalitas residual nilai taksiran model regresi, asumsi tidak terjadi multikolinieritas, asumsi tidak terjadi heterogenitas varians (asumsi heteroskedastisitas) dan tidak terjadi otokorelasi.

1. Pengujian Normalitas

Pengujian normalitas residu dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi yang mensyaratkan residual nilai taksiran model regresi harus berdistribusi normal. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil perhitungan uji normalitas residual dari persamaan taksiran yang diperoleh menggunakan SPSS adalah sebagai berikut :

Tabel 4.26
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

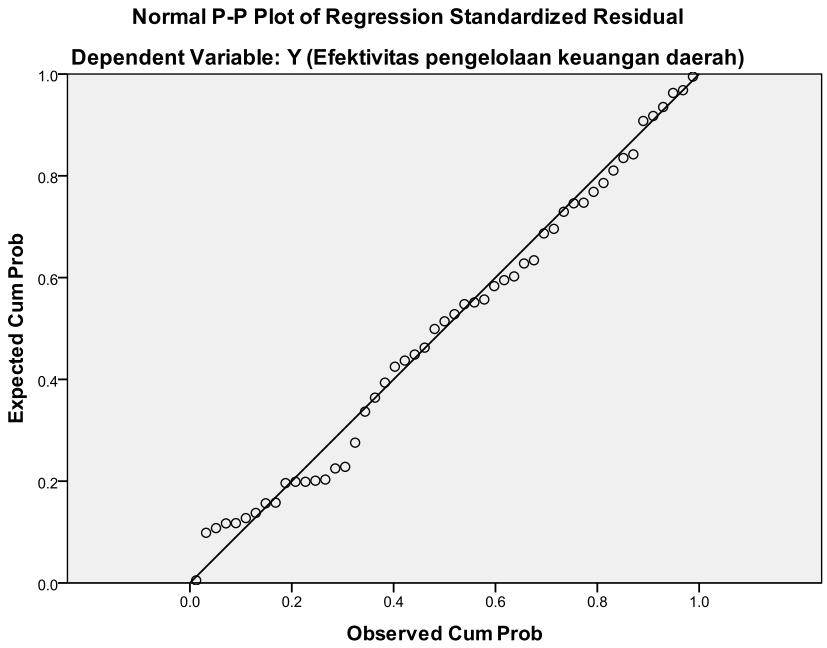
		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.48220697
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.090
	Negative	-.074
Kolmogorov-Smirnov Z		.644
Asymp. Sig. (2-tailed)		.801

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai D_{hitung} = 0,090 dengan p-value (nilai sig) sebesar 0,801. Hasil pengujian normalitas model regresi menunjukkan bahwa nilai residual dari model berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan normalitas menunjukan nilai probabilitas (sig.) *Kolmogorov-Smirnov Test* yang diperoleh untuk nilai residual sebesar 0,801 lebih besar dari 0,05.

Untuk mengetahui normalitas hasil regresi yang diperoleh dapat dilhat dari normal plot. Hasil PP plot untuk uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut.

Terlihat data menyebar disekitar garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual hasi taksiran regresi memenuhi asumsi berdistribusi normal.



Gambar 4.5
Grafik PPlot dari Hasil Pengujian Normalitas

2. Pengujian Multikolinearitas

Multikolinearitas menunjukkan kondisi variabel bebas dalam model regresi yang saling berkorelasi sempurna. Hal ini menjadikan persamaan regresi yang diperoleh tidak tepat dalam menjelaskan pengaruh X terhadap Y.

Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factors*). Nilai VIF yang kecil menunjukkan tidak adanya korelasi yang tinggi (sempurna) antar variabel X dalam model regresi. Batasan nilai untuk variabel dikatakan berkolinieritas tinggi jika diperoleh nilai VIF untuk variabel bebas lebih besar dari 10.

Tabel 4.27
Hasil Perhitungan VIF
Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1 (Kinerja Pegawai)	.820	1.220
	X2 (Pengawasan Fungsional)	.820	1.220

a. Dependent Variable: Y (Efektivitas pengelolaan keuangan daerah)

Sumber : Lampiran Output SPSS

Hasil perhitungan nilai VIF untuk variabel bebas dalam model regresi dalam penelitian ini menunjukkan angka yang lebih besar dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi kolinearitas yang tinggi antara variabel bebas dalam persamaan regresi yang diperoleh.

3. Pengujian Asumsi Bebas Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi bahwa varians residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Hasil pengujian dengan menggunakan pendekatan korelasi spearman antara nilai residual dengan variabel bebas (X_1 dan X_2) diberikan pada tabel berikut :

Tabel 4.28
Hasil Korelasi Rank Spearman untuk Uji Heteroskedastisitas
Correlations

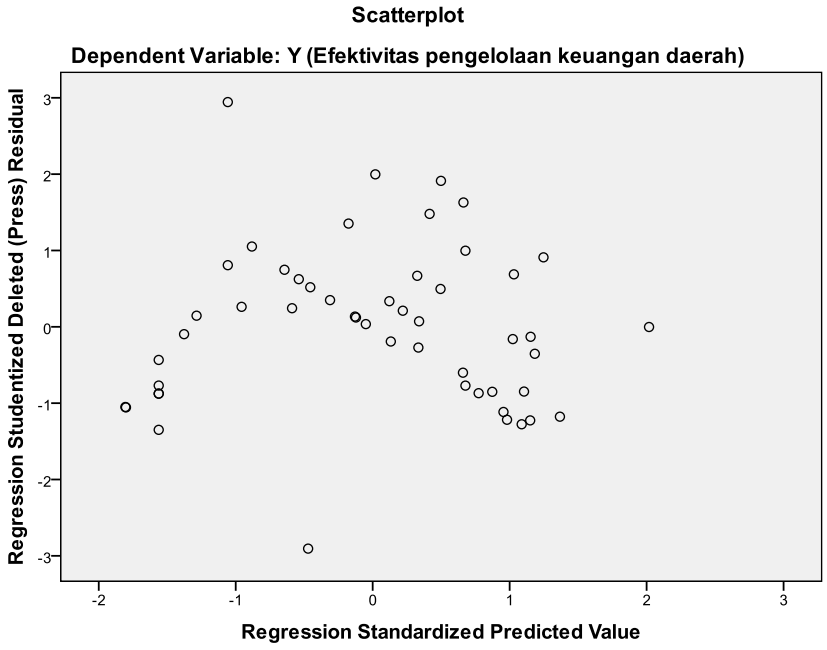
			absR	X1 (Kinerja Pegawai)	X2 (Pengawasan Fungsional)
Spearman's rho	absR	Correlation Coefficient	1.000	.118	-.136
		Sig. (2-tailed)	.	.410	.342
		N	51	51	51
	X1 (Kinerja Pegawai)	Correlation Coefficient	.118	1.000	.429**
		Sig. (2-tailed)	.410	.	.002
		N	51	51	51
	X2 (Pengawasan Fungsional)	Correlation Coefficient	-.136	.429**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.342	.002	.
		N	51	51	51

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Lampiran Output SPSS

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari residual homogen (tidak terdapat heteroskedastisitas). Hal ini ditunjukan oleh hasil korelasi variabel X_1 dan X_2 dengan nilai absolut dari residual (error) tidak signifikan pada level 5%. Diperoleh nilai signifikansi untuk X_1 sebesar 0,410 dan untuk X_2 sebesar 0,342 (nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sebagai batas tingkat kekeliruan).

Untuk mengetahui hasil Heteroskedastisitas dapat juga dilakukan dengan melihat grafik Scetter plot nilai residual. Hasil plot yang diperoleh dari SPSS dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 4.6
Grafik Scatter Plot dari Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Pada grafik scatterplot diatas terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal inimerupakan indikasi bahwa varian residu hasil persamaan regresi yang diperoleh homogen dan

dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastistas dalam persamaan regresi yang diperoleh.

4.4.1.3 Analisis Korelasi

Untuk memperoleh nilai korelasi secara parsial perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai sebagai berikut :

$\sum X_1 = 134{,}482$ $\sum X_2 = 110{,}078$ $\sum Y = 129{,}488$

$\sum X_1^2 = 380{,}335$ $\sum X_2^2 = 266{,}822$ $\sum Y^2 = 357{,}144$

$\sum X_1 Y = 359.877$ $\sum X_2 Y = 297{,}046$ $\sum X_1 X_2 = 301{,}912$

Perhitungan tersebut sesuai dengan perhitungan menggunakan *SPSS 14 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.29
Hasil Korelasi

Correlations

		X1 (Kinerja Pegawai)	X2 (Pengawasan Fungsional)	Y (Efektivitas pengelolaan keuangan daerah)
X1 (Kinerja Pegawai)	Pearson Correlation	1	.425**	.682**
	Sig. (2-tailed)		.002	.000
	N	51	51	51
X2 (Pengawasan Fungsional)	Pearson Correlation	.425**	1	.610**
	Sig. (2-tailed)	.002		.000
	N	51	51	51
Y (Efektivitas pengelolaan keuangan daerah)	Pearson Correlation	.682**	.610**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	51	51	51

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Diperoleh hasil perhitungan korelasi Kinerja Pegawai dan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah yaitu 0,682. Besarnya korelasi Kinerja Pegawai dan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah masuk dalam ketegori kuat. Nilai korelasi yang diperoleh positif berarti bahwa hubungan antara Kinerja Pegawai dan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah berbanding lurus (bersifat positif),

yang berarti semakin tinggi Kinerja Pegawai maka Efektivitas pengelolaan keuangan daerah diprediksi akan semakin baik.

Hasil perhitungan nilai korelasi Pengawasan Fungsional dan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah yaitu 0,610. Besarnya korelasi Pengawasan Fungsional dan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah masuk dalam ketegori kuat. Nilai korelasi yang diperoleh poasitif berarti hubungan antara Pengawasan Fungsional dan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah berbanding lurus (bersifat positif). Hasil tersebut berarti jika semakin baik Pengawasan Fungsional maka Efektivitas pengelolaan keuangan daerah diprediksi akan semakin baik.

Hasil perhitungan korelasi Kinerja Pegawai dan Pengawasan Fungsional yaitu 0,425. Besarnya korelasi Kinerja Pegawai dan Pengawasan Fungsional masuk dalam ketegori cukup kuat. Nilai korelasi yang diperoleh positif berarti bahwa hubungan antara Kinerja Pegawai dan Pengawasan Fungsional berbanding lurus (bersifat positif). Hasil tersebut berati jika semakin besar Kinerja Pegawai maka Pengawasan Fungsional akan semakin tinggi.

Perhitungan tersebut di atas juga sama dengan perhitungan *SPSS 14 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.30
Hasil Korelasi Parsial Kinerja Pegawai dengan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada saat Pengawasan Fungsional Konstan

Correlations

Control Variables			X1 (Kinerja Pegawai)	Y (Efektivitas pengelolaan keuangan daerah)
X2 (Pengawasan Fungsional)	X1 (Kinerja Pegawai)	Correlation	1.000	.590
		Significance (2-tailed)	.	.000
		df	0	48
	Y (Efektivitas pengelolaan keuangan daerah)	Correlation	.590	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.
		df	48	0

Nilai korelasi yang diperoleh antara Kinerja Pegawai dengan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada saat Pengawasan Fungsional konstan sebesar 0,590 masuk dalam kategori cukup kuat. Artinya antara Kinerja Pegawai dengan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada saat Pengawasan Fungsional konstan terjadi hubungan positif yang cukup kuat, jika Kinerja Pegawai semakin tinggi akan diikuti dengan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi semakin tinggi.

Koefisiensi Determinasi (Kd) parsial X_2 terhadap Y diperoleh menggunakan rumus berikut :

$Kd = r^2 \times 100\ \%$

$Kd = (0{,}590)^2 \times 100\ \%$

$Kd = 0{,}348 \times 100\%$

$Kd = 34{,}8\%$

Perhitungan tersebut di atas juga sama dengan perhitungan *SPSS 14 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.31
Hasil Korelasi Parsial Pengawasan Fungsional dengan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada saat Kinerja Pegawai konstan

Correlations

Control Variables			X2 (Pengawasan Fungsional)	Y (Efektivitas pengelolaan keuangan daerah)
X1 (Kinerja Pegawai)	X2 (Pengawasan Fungsional)	Correlation	1.000	.483
		Significance (2-tailed)	.	.000
		df	0	48
	Y (Efektivitas pengelolaan keuangan daerah)	Correlation	.483	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.
		df	48	0

Nilai korelasi yang diperoleh antara Pengawasan Fungsional dengan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada saat Kinerja Pegawai konstan sebesar 0,483 masuk dalam kategori cukup kuat. Artinya antara Pengawasan Fungsional dengan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada saat Pengawasan Fungsional konstan terjadi hubungan positif yang cukup kuat, jika Pengawasan Fungsional semakin tinggi akan diikuti dengan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi semakin tinggi.

Koefisiensi Determinasi (Kd) parsial X2 terhadap Y diperoleh menggunakan rumus berikut :

$Kd = r^2 \times 100\ \%$

$Kd = (0{,}483)^2 \times 100\ \%$

$Kd = 0{,}234 \times 100\%$

$Kd = 23{,}4\%$

Besar pengaruh Pengawasan Fungsional dengan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada saat Kinerja Pegawai tidak berubah 23,4%.

4.4.1.4 Analisis Korelasi Ganda dan Koefisien Determinasi

Tabel berikut merupakan hasil perhitungan koefisien determinasi untuk persamaan regresi yang diperoleh dengan *SPSS 14 for windows* sebagai berikut :

Tabel 4.32
Tabel Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.768[a]	.590	.573	.49215

a. Predictors: (Constant), X2 (Pengawasan Fungsional), X1 (Kinerja Pegawai)
b. Dependent Variable: Y (Efektivitas pengelolaan keuangan daerah)

Sumber : Lampiran Output SPSS

Diperoleh besarnya korelasi ganda antara Kinerja Pegawai dan Pengawasan Fungsional dengan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,768. Untuk meberikan interpretasi terhadap nilai korelasi yang diperoleh digunakan kriteria korelasi yang diberikan pada bab 3. Nilai korelasi yang diperoleh sebesar 0,768 masuk dalam kategori kuat. Artinya antara Kinerja Pegawai dan Pengawasan Fungsional dengan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah terjadi hubungan positif yang kuat. Jadi hubungan Kinerja Pegawai dan Pengawasan Fungsional dengan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah ada keterkaitan yang sejalan dengan hubungan yang kuat.

Koefisiensi Determinasi (KD) diperoleh menggunakan rumus berikut :

$Kd = R^2 \times 100\ \%$

$Kd = (0{,}768)^2 \times 100\ \%$

$Kd = 0{,}590 \times 100\%$

$Kd = 59{,}0\%$

Nilai R-*square* (R^2) atau koefisien determinasi sebesar 0,590 pada kolom ketiga pada tabel di atas menunjukkan besarnya pengaruh Kinerja Pegawai dan

Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Artinya 59,0% perubahan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi (dapat dijelaskan) oleh Kinerja Pegawai dan Pengawasan Fungsional sedangkan 41,0% lainnya dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas menggunakan uji F dan pada tahap kedua dilakukan uji secara parsial untuk melihat kebermaknaan masing-masing variabel bebas dalam model regresis yang diperoleh menggunakan uji t.

1. Pengujian Koefisien Regresi secara Simultan melalui Uji F

Uji F digunakan untuk pengujian koefisien regresi secara keseluruhan untuk mengetahui keberartian hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut :

Ho_1 : Kinerja Pegawai dan pengawasan fungsional tidak berpengaruh
$\beta_1 = \beta_2 = 0$ terhadap keuangan efektivitas pengelolaan daerah

Ha_1 : Kinerja Pegawai dan pengawasan fungsional berpengaruh terhadap
Ada $\beta_i \neq 0$ efektivitas pengelolaan keuangan daerah

Untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya dilakukan dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan nilai F_{tabel}. Dari tabel F diperoleh nilai F_{tabel} dengan $db_1 = 2$ dan $db_2 = 51\text{-}2\text{-}1 = 48$ sebesar 3,191.

Statistik uji untuk menguji hipotesis (Nilai F) dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$F = \frac{0,590 / 2}{(1 - 0,590) / (51 - 2 - 1)}$$

$$F = \frac{0,295}{0,410 / 48} = 34,575$$

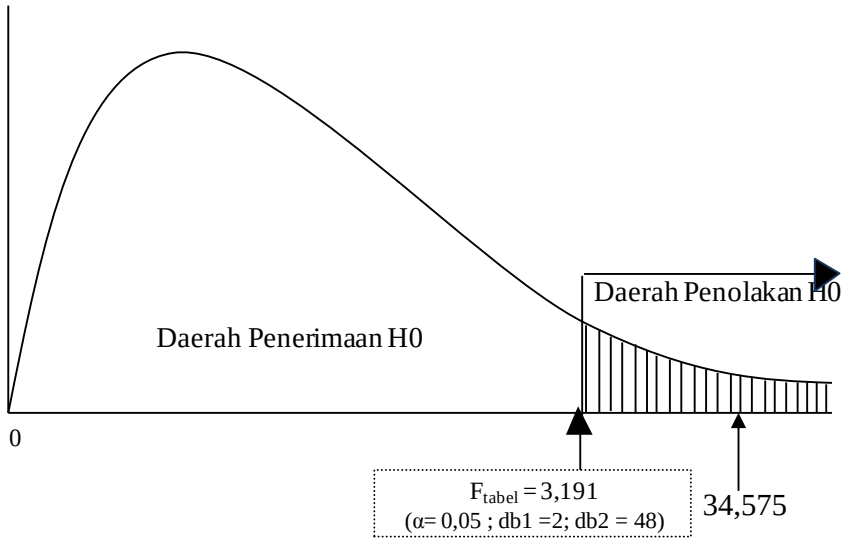
Nilai statistik uji F diperoleh dalam tabel Anova hasil SPSS pada tabel berikut:

Tabel 4.33
Hasil Uji Simultan
ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16.749	2	8.374	34.575	.000[a]
	Residual	11.626	48	.242		
	Total	28.375	50			

a. Predictors: (Constant), X2 (Pengawasan Fungsional), X1 (Kinerja Pegawai)
b. Dependent Variable: Y (Efektivitas pengelolaan keuangan daerah)
Sumber : Lampiran Output SPSS

Diperoleh nilai F hitung sebesar 34,575 dengan signifikansi 0,000. Keputusan penolakan/penerimaan hipotesis pada pengujian simultan dapat digambarkan dalam diagram daerah penerimaan dan penolakan Ho sebagai berikut:



Gambar 4.7

Daerah Penerimaan Dan Penolakan Ho Pada Pengujian Simultan

Diperoleh F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} (34,575 > 3,191). Dengan demikian, hasil uji menunjukkan menolak Ho. Jadi hasil pengujian statistik secara simultan adalah tidak signifikan. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya (0,000) yang lebih kecil dari nilai α = 0,05), yang berarti kesalahan untuk menyatakan ada pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas signifikan sangat kecil atau lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 5% (α = 0,05).

Artinya Kinerja Pegawai dan Pengawasan Fungsional secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial melalui Uji t

Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh signifikan secara parsial dilakukan pengujian koefisien regresi dengan menggunakan statistik Uji t. Penentuan hasil pengujian (penerimaan/ penolakan H_0) dapat dilakukan dengan

membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Nilai t_{tabel} dengan taraf kesalahan 5% dan db = n–k–1 = 51-2-1 = 48 adalah 2,011.

a. Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah

Untuk melihat pengaruh Kinerja Pegawai terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah, hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_{02} :$\beta_1 = 0$ Kinerja Pegawai tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

Ha_2 : $\beta_1 \neq 0$ Kinerja Pegawai berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

Nilai t hitung dapat diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut

$$t = r_{YX_1.X_2} \times \sqrt{\frac{n-k-1}{1-r^2_{YX_1.X_2}}}$$

$$t = 0,5897 \times \sqrt{\frac{51-2-1}{1-0,5897^2}}$$

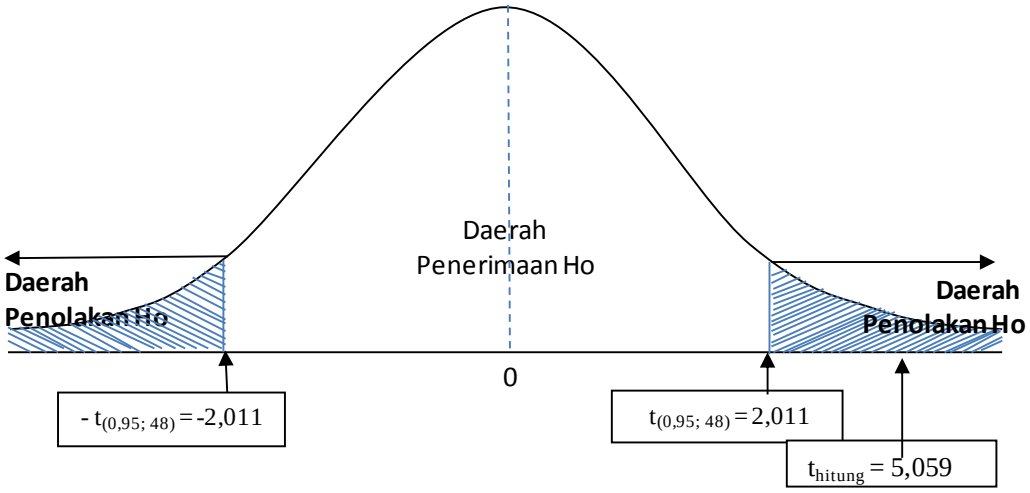
$$t = 0,537 \times \sqrt{73,596}$$

$$t = 0,537 \times 8,579$$

$$t = 5,059$$

Hasil perhitungan nilai t-hitung untuk variabel Kinerja Pegawai (X_1) diperoleh sebesar 5,059 dengan nilai signifikansi (p-value) = 0,000.

Keputusan penolakan/penerimaan hipotesis (hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}) pada pengujian parsial dapat digambarkan dalam diagram daerah penerimaan dan penolakan H_0 sebagai berikut :



Gambar 4.8
Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji Parsial X_1 terhadap Y

Diperoleh nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (t_{hitung} = 5,059 > t_{tabel} = 2,011). Keputusan uji adalah menolak H0. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya (0,000) yang lebih kecil dari nilai α = 0,05. Artinya kesalahan untuk menyatakan ada pengaruh Kinerja Pegawai terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah signifikan sangat kecil atau lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 5% (α = 0,05) sehingga keputusan uji adalah menolak H0.

Hasil pengujian dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95% bahwa Kinerja Pegawai berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

b. Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah

Untuk melihat pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah, hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_{03} :$\beta_2 = 0$ Tidak terdapat pengaruh dari Pengawasan fungsional terhdap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah

Ha_3 : $\beta_2 \neq 0$ Terdapat pengaruh dari Pengawasan Fungsional terhdap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah

$$t = r_{YX_2.X_1} \times \sqrt{\frac{n-k-1}{1-r^2_{YX_2.X_1}}}$$

$$t = 0,4834 \times \sqrt{\frac{51-2-1}{1-04834^2}}$$

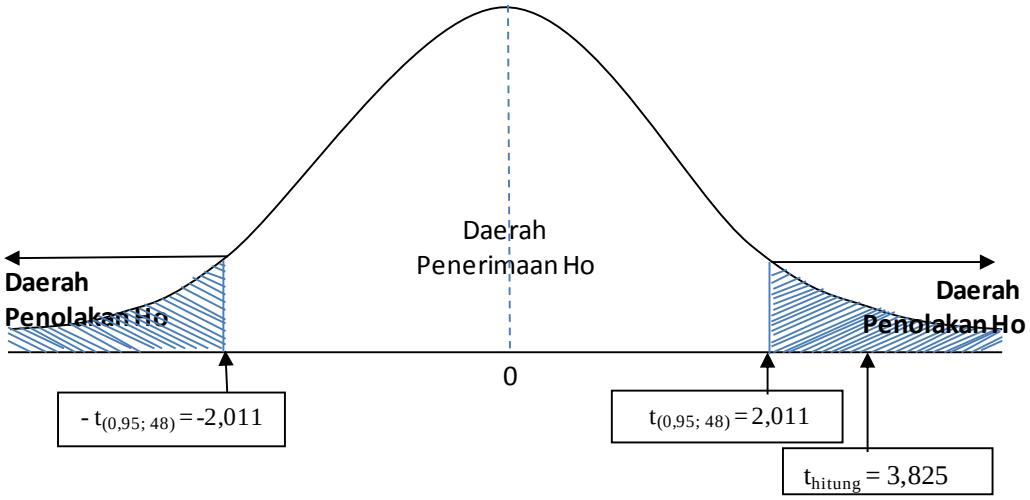
$$t = 0,4834 \times \sqrt{62,634}$$

$$t = 0,4834 \times 7,914$$

$$t = 3,825$$

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t-hitung untuk variabel Pengawasan Fungsional (X_2) sebesar 3,825 dengan nilai signifikansi (p-value) = 0,000.

Keputusan penolakan/penerimaan hipotesis (hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}) pada pengujian parsial dapat digambarkan dalam diagram daerah penerimaan dan penolakan H_0 sebagai berikut :



Gambar 4.9
Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji Parsial X_2terhadap Y

Diperoleh nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (t_{hitung} = 3,825 > t_{tabel} = 2,011). Keputusan uji adalah menolak H0. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya (0,000) yang lebih kecil dari nilai α = 0,05. Artinya kesalahan untuk menyatakan ada pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah signifikan sangat kecil atau lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 5% (α = 0,05) sehingga keputusan uji adalah menolak H0.

Hasil pengujian dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95% bahwa Pengawasan Fungsional berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah. (Dina Handayani, 2009)